

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PEMBINGKAIAN BERITA KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA PADA KOMPAS.COM DAN ANTARANEWS.COM

Pada bab sebelumnya, peneliti telah menjabarkan hasil identifikasi elemen-elemen utama pemingkaian dari 22 artikel berita tentang kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia yang dirilis oleh Kompas.com dan Antaranews.com sepanjang periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2024. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis perbandingan pemingkaian berita. Analisis ini dilakukan untuk menemukan perbedaan maupun bingkai yang digunakan oleh kedua media online dalam memberitakan berbagai persoalan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia.

4.1. Media Massa dan Pemingkaian Berita Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia

Media massa bukan sekadar saluran informasi yang menjadi cerminan dunia nyata, melainkan institusi yang secara aktif membentuk konstruksi realitas sosial tersendiri tentang dunia beserta berbagai problematika yang terjadi di masyarakat. Pemahaman ini dilandasi oleh perspektif pemikiran Berger dan Luckman (1966) yang menyebut bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi secara simultan. Proses eksternalisasi terjadi saat individu mengekspresikan diri melalui interaksi sosial

sehingga membentuk produk atau lingkungan sosial. Objektivasi terjadi saat produk sosial yang telah dibentuk dianggap sebagai realitas dunia yang objektif atau nyata. Pada tahap ini, institusi sosial seperti sekolah, lembaga keagamaan, atau organisasi di masyarakat berperan memengaruhi pemahaman masyarakat atas realitas. Sedangkan internalisasi adalah proses ketika individu menyerap kembali realitas objektif menjadi bagian dari kesadaran subjektifnya (Galbin, 2014:82-92). Dalam konteks masyarakat modern, media massa memegang peran penting dalam ketiga proses tersebut, khususnya eksternalisasi dan objektivasi.

Setiap berita yang dihasilkan oleh media massa merupakan bagian dari produk sosial yang memuat realitas dunia yang telah dikonstruksikan. Konstruksi tersebut terbentuk karena adanya proses pembingkai berita yang dilakukan oleh jurnalis dan redaktur media massa. Pembingkai merujuk pada proses penyusunan atau pengorganisasian berita, di mana media massa menyoroti aspek-aspek tertentu dari sebuah isu dan memfokuskan perhatian pada isu tersebut. Pengorganisasian berita ini bertujuan untuk membantu khalayak memahami realitas tentang peristiwa atau isu-isu yang diliput oleh media massa secara lebih sederhana (Littlejohn, 2017:165). Proses pembentukan bingkai berita menurut Entman (1993) dilakukan melalui dua tahap : seleksi fakta dan penonjolan isu. Seleksi berkaitan dengan proses penyaringan realitas, di mana media massa memilih fakta, isu, sumber berita, atau aspek tertentu dari suatu realitas dan menyisihkan aspek lainnya. Sedangkan penonjolan merupakan cara media untuk membuat fakta terlihat dan bermakna sehingga dapat memengaruhi pemahaman khalayak atas realitas. (Yusriana, 2024:185)

Kebijakan pengendalian tembakau merupakan persoalan besar, kompleks, dan menyangkut berbagai kepentingan di masyarakat. Namun, di sisi lain, media massa sendiri memiliki keterbatasan ruang dan waktu untuk menampilkan realitas seputar kebijakan pengendalian tembakau secara utuh. Oleh karena itu, mereka akan melakukan seleksi dari berbagai fakta yang ada dan menonjolkan aspek tertentu dari persoalan kebijakan pengendalian tembakau yang dianggap penting. Melalui pembingkai berita, media massa mengarahkan persepsi khalayak untuk memahami apa yang menjadi masalah utama, faktor-faktor penyebab, serta solusinya. Selain itu, media massa juga memberikan evaluasi moral terhadap realitas serta aktor yang terlibat di dalamnya.

4.2. Analisis Perbandingan Pembingkai Berita Kebijakan Pengendalian Tembakau pada Kompas.com dan Q

Pada tahapan analisis perbandingan pembingkai berita seputar kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia yang dirilis oleh Kompas.com dan Antaranews.com, peneliti melakukan pengelompokan 22 artikel berita yang ada ke dalam 6 (enam) kategori tema besar. Pada setiap kategori tersebut, peneliti menjabarkan bingkai yang paling dominan digunakan oleh Kompas.com dan Antaranews.com. Selain itu, peneliti juga menjelaskan adanya perbedaan dan kesamaan pola seleksi fakta dan penonjolan aspek realitas yang dilakukan oleh kedua media online untuk memperkuat pembentukan bingkai berita.

4.2.1. Regulasi Pengendalian Tembakau

Keberadaan regulasi dalam kebijakan pengendalian tembakau memiliki arti penting. Selain berperan sebagai instrumen yang mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan upaya pengendalian tembakau, adanya regulasi juga menjadi arena pertarungan agenda bagi para pendukung dan penentang kebijakan tersebut. Perdebatan terkait regulasi pengendalian tembakau dapat terjadi selama masa penyusunan hingga pascapenetapan. Perbedaan sudut pandang terhadap substansi serta kebijakan yang ada di dalam regulasi ini membentuk perbedaan bingkai di antara Kompas.com dan Antaranews.com. Kompas.com cenderung membingkai regulasi pengendalian tembakau sebagai ancaman bagi keberlangsungan ekosistem industri tembakau. Bingkai ini terbentuk seiring munculnya berbagai penolakan terhadap usulan regulasi pengendalian tembakau yang baru. Kompas.com secara konsisten menampilkan kritik dan penolakan pada judul atau *headline* berita antara lain “*Pengusaha Nilai Revisi PP Soal Rokok Bisa Pengaruhi Penerimaan Negara*” dan “*Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Pasal 154 RUU Kesehatan yang Samakan Tembakau dengan Narkotika*”. Berita pertama secara khusus membahas tentang rencana pemerintah untuk merevisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Sedangkan pemberitaan kedua berkaitan dengan usulan Pasal 154 tentang Pengamanan Zat Adiktif di RUU Kesehatan. Melalui penggunaan judul berita, media massa dapat mengarahkan persepsi khalayak bahkan sebelum mereka membaca detail isi berita (Brugeman, 2014:68).

Sebagai bagian dari proses penonjolan aspek realitas atau isu, judul yang dibuat oleh jurnalis Kompas.com cenderung menekankan adanya dampak negatif dari substansi regulasi pengendalian tembakau yang diusulkan. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk ancaman bagi industri tembakau serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Pembentukan bingkai regulasi sebagai bentuk ancaman ini diperkuat oleh pendapat narasumber. Misalnya pada artikel berita Kompas.com berjudul “*Pengusaha Nilai Revisi PP Soal Rokok Bisa Pengaruhi Penerimaan Negara*” yang dirilis pada 15 Februari 2023, jurnalis menyampaikan pendapat dari Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Nayoan dengan menulis narasi sebagai berikut,

“Dia menyebut bahwa apabila peraturan tersebut resmi diubah, maka akan memberikan dampak yang negatif pada pekerja sektor tembakau yang saat ini berjumlah 6,1 juta pekerja di sepanjang rantai pasok sektor tembakau.”

Jurnalis melalui narasi di atas berupaya menekankan bahwa dampak negatifnya bukan pada kerugian finansial yang akan dirasakan oleh pengusaha industri tembakau, melainkan pada ancaman hilangnya jutaan lapangan kerja di sektor ini. Ekosistem industri tembakau sendiri telah terbentuk sejak lama dan menjadi tempat bagi jutaan orang untuk menggantungkan hidupnya, baik sebagai petani tembakau, buruh pabrik rokok, pekerja ritel dan sales pemasaran, pekerja di bidang periklanan, hingga para pedagang. Hilangnya lapangan kerja ini menjadi bagian dari bingkai ekonomi dan kesejahteraan sosial yang cukup

sering ditampilkan di berbagai berita. Para teoretisi framing meyakini bahwa media massa tidak menghadirkan cara baru untuk memahami realitas, melainkan memilih pesan-pesan yang sedemikian rupa sehingga selaras dengan pemahaman dalam ingatan masyarakat luas. Media massa akan memunculkan bingkai-bingkai yang ada sejak lama dan telah menjadi bagian dari budaya. (Littlejohn, 2017:166)

Secara umum, penyebab masalah yang ditekankan oleh Kompas.com adalah substansi regulasi yang dinilai terlalu restriktif sehingga akan membatasi ketat setiap aktivitas yang dilakukan oleh industri tembakau. Selain itu, usulan regulasi juga cenderung bersifat diskriminatif bagi masyarakat yang bekerja di sektor industri tembakau. Hal ini seperti disampaikan oleh Vita Ervina selaku anggota Komisi IV DPR RI pada artikel berita berjudul *“Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Pasal 154 RUU Kesehatan yang Samakan Tembakau dengan Narkotika”* sebagai berikut,

“Apabila RUU Kesehatan Pasal 154 diloloskan, petani tembakau akan mendapat predikat buruk. Bahkan, kata Vita, petani tembakau bisa disebut sebagai penyebab penyakit hingga kematian yang menghabiskan paling banyak dana kesehatan.”

Narasi yang ditulis tersebut menempatkan rakyat kecil yang bekerja di sektor industri tembakau sebagai korban sebenarnya dari regulasi pengendalian tembakau yang dianggap diskriminatif dan restriktif. Hal ini akan membentuk pemahaman khalayak bahwa pemerintah bersikap tidak etis serta tidak

proporsional karena hanya menekankan pada persoalan kesehatan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem industri tembakau di Indonesia.

Selain itu, regulasi pengendalian tembakau dipandang sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Persepsi ini akan semakin memperkuat argumen para penentang kebijakan untuk menolak setiap regulasi pengendalian tembakau yang diusulkan.

Untuk membangun perspektif tentang ancaman terhadap keberlangsungan industri tembakau dan perekonomian nasional ini, Kompas.com menghadirkan narasumber dari kalangan asosiasi pengusaha rokok (GAPPRI dan GAPRINDO) dan anggota legislatif. Pemilihan narasumber merupakan bagian dari pemilihan fakta mana yang ingin disampaikan kepada khalayak pembaca. Asosiasi pengusaha rokok merepresentasikan pihak yang terdampak kebijakan, namun di saat yang sama mereka juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi khalayak terhadap regulasi dan kebijakan pengendalian tembakau. Sementara itu, narasumber dari kalangan anggota legislatif lebih merepresentasikan suara dan kepentingan rakyat yang terdampak kebijakan. Dalam pemberitaan Kompas.com, narasumber berasal dari Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, perkebunan, dan kelautan, sehingga mereka dianggap mewakili kepentingan kelompok petani tembakau.

Pemilihan narasumber juga memperjelas kecenderungan bingkai yang digunakan oleh media massa. Pemberitaan Kompas.com menggunakan dua narasumber utama, yaitu asosiasi perusahaan rokok dan anggota DPR. Pemilihan

asosiasi pengusaha rokok sebagai narasumber dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan dari pihak yang terdampak kebijakan sekaligus merepresentasikan kekuatan industri tembakau dalam memengaruhi opini publik terhadap regulasi dan kebijakan pengendalian tembakau. Sementara itu, anggota DPR dianggap sebagai tokoh yang secara legitimasi memiliki kewenangan untuk membentuk, merevisi, maupun mengoreksi peraturan perundang-undangan. Selain itu, para anggota legislatif ini berasal dari Komisi IV DPR yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan sehingga dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat yang bekerja sebagai petani tembakau. Sejalan dengan penolakan yang disampaikan oleh narasumber dari asosiasi pengusaha rokok maupun anggota legislatif, Kompas.com membingkai narasi tentang pengkajian ulang maupun penghapusan terhadap usulan regulasi pengendalian tembakau sebagai solusi untuk mencegah potensi dampak negatifnya bagi industri tembakau. Rekomendasi tersebut disampaikan secara eksplisit yang ditandai dengan sejumlah frasa seperti “*mengkaji ulang usulan revisi peraturan*” dan “*membatalkan usulan pasal*”. Pemerintah juga diminta untuk lebih objektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain selain kesehatan serta dampak negatif dari penetapan regulasi.

Dari kedua pemberitaan terkait regulasi pengendalian tembakau, Kompas.com secara konsisten mengusung satu bingkai dominan, yaitu regulasi pengendalian tembakau sebagai sebuah ancaman. Hal ini jelas menunjukkan bahwa media online ini mengusung misi untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau di Indonesia yang selama ini dinilai telah banyak

berkontribusi terhadap jutaan lapangan kerja serta merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara yang terbesar melalui cukai hasil tembakau. Penggunaan bingkai dominan ini mempertegas kuatnya pendekatan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam persoalan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Kecenderungan Kompas.com yang menempatkan diri sebagai media massa yang membawa dua kepentingan sekaligus, yaitu memperjuangkan nasib rakyat kecil sekaligus merepresentasikan media yang memiliki keterikatan dengan industri tembakau yang selama ini telah banyak beriklan.

Sementara itu, Antaranews.com mengambil posisi sudut pandang yang berbeda dari Kompas.com dalam memberitakan isu regulasi pengendalian tembakau. Jika Kompas.com membangun bingkai tunggal yang fokus pada dampak negatif regulasi dan ancamannya bagi keberlangsungan ekosistem industri tembakau, maka Antaranews.com justru lebih condong pada keberadaan regulasi sebagai instrumen hukum yang memperkuat kebijakan pengendalian tembakau. Bingkai ini dapat dilihat pada dua pemberitaan Antaranews.com yang berjudul *“Pelaku IHT Sebut PP 109/2012 Masih Relevan Atur Industri Tembakau”* dan *“DPR RI Diminta Tak Hapus Pasal Zat Adiktif pada RUU Kesehatan”*. Dari kedua judul tersebut, sekilas terlihat bahwa ada perbedaan sikap atau sudut pandang di antara kedua berita tersebut. Berita pertama cenderung menolak usulan revisi PP 109 Tahun 2012, sementara berita kedua mendukung usulan pasal pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan. Hanya saja, keduanya tetap menyepakati keberadaan regulasi sebagai instrumen penting dalam kebijakan pengendalian tembakau.

Berita pertama yang berjudul “*Pelaku IHT Sebut PP 109/2012 Masih Relevan Atur Industri Tembakau*” yang dipublikasikan pada 14 Februari 2023 menyoroti ketiadaan urgensi dari rencana revisi peraturan. Meskipun Antaranews.com menunjukkan sikap penolakan terhadap usulan revisi PP 109 Tahun 2012 seperti halnya Kompas.com, terdapat perbedaan dalam cara penolakan tersebut dikonstruksikan oleh media massa. Perbedaan bingkai ini terlihat dari penggunaan judul berita. Antaranews.com berupaya membingkai penolakan dengan menekankan pendapat dari asosiasi pengusaha rokok. Kalangan ini menilai regulasi yang ada saat ini masih relevan untuk mengatur aktivitas industri tembakau seperti iklan, promosi, dan perdagangan rokok sehingga tidak perlu direvisi. Dalam membangun bingkai ini, Antaranews.com juga menekankan bahwa penolakan yang sebenarnya tidak terletak pada substansi, melainkan pada implementasi regulasi yang masih lemah. Hal ini terlihat dari narasi yang ditulis oleh jurnalis Antaranews.com sebagai berikut,

“Senada dengan Benny, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najooan mengungkapkan PP 109/2012 yang berlaku saat ini masih relevan untuk diterapkan, meskipun pelaksanaannya masih banyak kekurangan.”

Selaras dengan perbedaan penyebab masalah, Antaranews.com juga menawarkan solusi yang berbeda pada Kompas.com. Dalam pemberitaannya, Antaranews.com merekomendasikan solusi berupa pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan penguatan implementasi dari regulasi yang sudah berlaku

Pada artikel berita berjudul “*DPR RI Diminta Tak Hapus Pasal Zat Adiktif pada RUU Kesehatan*”, [Antaraneews.com](#) lebih menampilkan sikap yang mendukung keberadaan regulasi karena dinilai sebagai penguatan upaya pengendalian tembakau. Pembingkai berita dilakukan melalui dua proses yang disebut oleh Entman (1993) sebagai seleksi fakta dan menonjolan isu (Yusriana, 2024:185). Pemberitaan ini menyoroti ancaman hilangnya seluruh aturan pengendalian tembakau di Indonesia apabila DPR selaku lembaga legislatif menghapus usulan pasal pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan. Narasi yang dibangun oleh jurnalis menjadi bentuk perlawanan atau opini tandingan terhadap tuntutan penghapusan Pasal 154 RUU Kesehatan yang disuarakan oleh sejumlah kalangan, terutama pelaku usaha industri tembakau. Hal ini jelas bertentangan dengan sudut pandang [Kompas.com](#) yang lebih melihat dampak negatif dari penetapan regulasi pengendalian tembakau. Dalam mendefinisikan masalah dan faktor penyebabnya, [Antaraneews.com](#) mengutip pernyataan dari Nina Samidi selaku Program Manager Komnas Pengendalian Tembakau serta Manik Marganamahendra selaku Ketua Indonesian Youth Council for Tactical Change. Pemilihan kedua narasumber tersebut merupakan bagian dari proses seleksi fakta yang mempertegas posisi media massa dalam mendukung keberadaan pasal pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan. Keduanya merepresentasikan jaringan masyarakat sipil yang mendukung upaya advokasi untuk memperkuat kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam pemberitaan ini adalah mempertahankan usulan pasal pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa Kompas.com dan Antaranews.com meletakkan persoalan usulan regulasi pengendalian tembakau pada kerangka isu yang berbeda. Kompas.com lebih menekankan isu dampak ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kedua artikel berita dari Kompas.com juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi ekosistem industri tembakau beserta pekerja di dalamnya. Sementara Antaranews.com lebih mengarah pada isu hukum dan kebijakan publik, tujuan dari regulasi adalah memperkuat kebijakan secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan regulasi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat. Perbedaan ini sekaligus menunjukkan agenda kepentingan yang berbeda dari kedua online dalam penerapan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia.

4.2.2 Kebijakan Fiskal dan Nonfiskal

Strategi utama dalam upaya pengendalian tembakau yang selama ini direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah pengurangan permintaan konsumsi produk olahan tembakau melalui dua pendekatan kebijakan. Pertama, kebijakan fiskal merupakan bagian dari instrumen keuangan negara, yaitu pengenaan cukai pada produk olahan tembakau dan penetapan harga jual eceran (HJE) rokok. Kedua, kebijakan nonfiskal atau strategi pengendalian tembakau yang tidak berbasis pada aspek ekonomi, seperti larangan penjualan rokok eceran dan aturan kemasan rokok polos tanpa merek. Beragamnya strategi ini membuat isu seputar kebijakan pengendalian tembakau tidak pernah absen dari pemberitaan media massa di Indonesia. Penerapan kebijakan baru maupun perubahan aturan yang ada sering

kali memicu pro-kontra yang kemudian mendorong media massa untuk meliput dan membingkainya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Baik Kompas.com maupun Antaranews.com menyediakan ruang bagi para pendukung maupun penentang kebijakan untuk menyuarakan pandangannya, sehingga menghasilkan keberagaman bingkai berita yang mencerminkan pluralitas sudut pandang redaksional masing-masing media.

Terdapat empat artikel berita di Kompas.com yang membahas isu terkait kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengendalian tembakau. Secara umum, keempat berita berfokus pada dampak kebijakan bagi masyarakat, namun membentuk bingkai yang berbeda. Bingkai pertama yang dominan adalah kebijakan pengendalian tembakau sebagai ancaman bagi keberlangsungan industri tembakau. Bingkai ini tampak pada tiga dari empat berita, yaitu *“Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Picu Maraknya Rokok Ilegal”*, *“Dampak Penerapan Kemasan Rokok Polos Menurut Asosiasi”*, dan *“Harga Eceran Rokok Naik per 2025, Gapprindo Soroti Dampaknya”*. Pemilihan diksi "dampak" dan "dinilai picu" pada ketiga judul tersebut secara konsisten menekankan konsekuensi negatif dari penetapan kebijakan sebagai fokus utama dari pemberitaan. Bingkai dibangun dengan menyoroti permasalahan kebijakan fiskal dan nonfiskal yang dinilai membebani kalangan industri tembakau dan berpotensi memicu maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran. Permasalahan terjadi karena keputusan untuk menaikkan tarif cukai dan harga jual eceran rokok ini tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan pemerintah terhadap rokok ilegal. Permasalahan dan

faktor penyebab setidaknya terlihat dari pernyataan Hananto Wibisono selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam artikel berita berjudul “*Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Picu Maraknya Rokok Ilegal*” sebagai berikut,

“Ini diawali dengan downtrade (mencari harga rokok yang lebih murah dengan menyesuaikan padanan selera terhadap produk yang dikonsumsi). Maka saat ini di pasar bisa ditemui rokok dengan harga murah, jelasnya.”

Pemberitaan ini menempatkan pemerintah sebagai aktor penyebab masalah mengingat kebijakan yang dikeluarkan tidak dikaji secara matang dan proporsional. Sementara industri tembakau dipandang sebagai pihak yang paling terdampak dan dirugikan oleh kenaikan cukai dan harga rokok. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah adalah konsistensi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran rokok ilegal agar sejalan dengan tujuan utama kebijakan fiskal, yaitu mengurangi permintaan konsumsi rokok di masyarakat. Pemerintah juga dinilai perlu untuk mempertimbangkan secara lebih matang kemampuan daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian sebelum menaikkan cukai hasil tembakau dan harga jual eceran rokok.

Dalam membentuk bingkai ini, Kompas.com cenderung mengandalkan satu narasumber per artikel yang seluruhnya berasal dari kalangan industri tembakau, antara lain Hananto Wibisono (Sekjen AMTI), Henry Nayoan (Ketua GAPPRI), dan Benny Wachjudi (GAPPRINDO). Kompas.com memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya sebagai pihak yang

terdampak kebijakan. Pilihan narasumber tunggal dari kelompok industri ini secara tidak langsung membatasi keberagaman perspektif dalam pemberitaan dan memperkuat bingkai ancaman terhadap industri tembakau sebagai satu-satunya sudut pandang yang merepresentasikan realitas kebijakan tersebut.

Bingkai kedua yang dibangun oleh Kompas.com dalam memberitakan persoalan kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengendalian tembakau adalah kebijakan sebagai upaya perlindungan sosial bagi masyarakat. Berbeda dengan ketiga pemberitaan sebelumnya yang lebih mengedepankan permasalahan dampak negatif kebijakan bagi industri tembakau, artikel ini justru memfokuskan permasalahan pada aksesibilitas rokok di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Permasalahan utamanya terletak pada kemudahan akses terhadap rokok eceran yang membuat masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah justru semakin rentan terhadap konsumsi rokok. Fenomena ini sebenarnya disebabkan oleh sistem penjualan rokok eceran per batang yang memungkinkan pembelian dengan harga murah. Kompas.com pada pemberitaan ini cenderung menempatkan kebijakan larangan penjualan rokok eceran dalam PP No. 28 Tahun 2024 sebagai langkah tepat dan berpihak pada rakyat kecil. Pemilihan YLKI sebagai narasumber merepresentasikan suara konsumen dan kelompok masyarakat sipil yang mendukung regulasi tersebut, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap dominasi suara industri dalam tiga berita sebelumnya.

Dari analisis keempat artikel berita tersebut, dapat diketahui bahwa Kompas.com tidak terikat pada satu bingkai tunggal dalam memberitakan

kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengendalian tembakau. Meski begitu, bingkai dominan yang muncul adalah narasi tentang dampak ekonomi kebijakan terhadap keberlangsungan industri tembakau. Hal ini tercermin dari tiga dari empat artikel yang mengangkat suara kalangan industri sebagai representasi utama realitas kebijakan. Di sisi lain, satu artikel yang memuat suara YLKI menunjukkan bahwa Kompas.com juga menyediakan ruang bagi perspektif perlindungan konsumen atau perlindungan sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Keberadaan kedua bingkai secara bersamaan ini menunjukkan kecenderungan Kompas.com untuk melihat isu pengendalian tembakau dari dimensi dampak sosial-ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi keberlangsungan industri maupun perlindungan kelompok berpenghasilan rendah.

Seperti halnya Kompas.com, Antaranews.com juga tidak terikat pada satu bingkai dominan dalam menyampaikan realitas terkait kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengendalian tembakau kepada khalayaknya. Bingkai pertama lebih menekankan kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengendalian tembakau sebagai kebijakan yang tidak mengancam industri tembakau dan perekonomian nasional. Pada pemberitaan berjudul “Pabrik Rokok Kecil Kudus Tak Permasalahkan Kenaikan Tarif Cukai Rokok” dan “Bea Cukai: Larangan Penjualan Rokok Eceran Tak Ganggu Setoran Negara”, Antaranews.com mencoba menjabarkan argumen tandingan untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat, terutama kalangan industri tembakau, akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan. Meskipun kekhawatiran maupun

persepsi negatif tersebut cenderung sudah melekat dan tertanam dalam persepsi khalayak, media online mencoba menghadirkan konstruksi realitas yang berbeda untuk memberikan pemahaman baru yang cenderung berlawanan dengan pemahaman yang berkembang secara umum di masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan Berger dan Luckmann bahwa realitas selalu berkembang dan direproduksi berulang-ulang melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Galbin, 2014:82-92). Antaranews.com juga berupaya menyoroti bahwa kekhawatiran atas kebijakan pengendalian tembakau dibentuk oleh persepsi dominan yang selama ini dibentuk oleh industri tembakau, khususnya perusahaan-perusahaan rokok golongan besar. Melalui penggunaan judul berita, Antaranews.com juga cenderung berupaya menunjukkan sikap yang netral dalam menghadapi kebijakan baru terkait pengendalian tembakau.

Pada pemberitaan lainnya yang berjudul “Kemasan Rokok Polos Dapat Kurangi Minat Perokok Awal”, Antaranews.com lebih mengedepankan sikap mendukung kebijakan. Media online ini membangun bingkai kebijakan pengendalian tembakau sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Bingkai ini dibangun dari kesadaran akan tingginya prevalensi perokok di Indonesia sebagai permasalahan utamanya. Hal ini disebabkan oleh kejelian industri tembakau dalam mempromosikan produknya, salah satunya melalui desain bungkus rokok yang menarik perhatian dan minat masyarakat sehingga mendorong mereka untuk mengonsumsi rokok. Oleh karena itu, penerapan kemasan rokok polos dianggap dapat menjadi solusi untuk menekan minat perokok awal untuk mencoba mengonsumsi rokok. Dari

pemberitaan tersebut, Antaranews.com lebih mengedepankan sikap mendukung kebijakan dengan menyoroti manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat jika kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Bingkai yang dibangun ini tentunya bertentangan dengan bingkai Kompas.com yang fokus pada dampak negatif dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan kemasan rokok polos.

Sementara pada pemberitaan berjudul “INDEF : Kenaikan Harga Jual Eceran Suburkan Rokok Ilegal”, Antaranews.com berupaya melakukan seleksi fakta dan menonjolkan isu yang sejalan dengan kritik yang telah disampaikan dalam pemberitaan Kompas.com terhadap persoalan kenaikan harga jual eceran rokok. Keduanya sama-sama menilai kebijakan pemerintah ini berpotensi memicu maraknya rokok ilegal di pasaran. Hanya saja terdapat perbedaan yang cukup krusial, yaitu pada pemilihan narasumber. Jika Kompas.com mengandalkan pendapat dari asosiasi industri, yaitu GAPRINDO, dalam mengkritik kenaikan harga jual eceran rokok, Antaranews.com justru membangun kritik menggunakan pandangan dari lembaga riset independen, yaitu INDEF. Hal ini berdampak pada persepsi khalayak terhadap legitimasi fakta yang disajikan oleh media massa. Sebuah fakta yang identik dapat memiliki bobot persuasif yang berbeda bergantung pada siapa yang menyampaikannya (Entman, 1993:53). Pendapat dari lembaga riset cenderung dipersepsikan lebih objektif apabila dibandingkan dengan pendapat dari asosiasi yang dianggap mengusung agenda kepentingan tersendiri. Secara keseluruhan, analisis terhadap delapan artikel berita di atas menunjukkan bahwa Kompas.com

dan Antaranews.com tidak terikat pada satu bingkai dominan saja, melainkan menyajikan beragam bingkai dalam menyoroti persoalan kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengendalian tembakau.

4.2.3 Perlindungan Generasi Muda dari Rokok

Kebijakan pengendalian tembakau mengusung misi untuk melindungi masyarakat terutama generasi muda dari ancaman bahaya rokok. Oleh karena itu adanya fakta bahwa jumlah atau prevalensi perokok anak muda di Indonesia mendapat perhatian dari media. Secara umum, kedua media online menyoroti persoalan maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok telah dengan fenomena peningkatan perokok aktif di kalangan anak-anak secara signifikan. Meski begitu Kompas.com dan Antaranews.com menggunakan strategi dan pendekatan yang berbeda dalam memberitakan persoalan ini.

Kompas.com cenderung membangun bingkai berita dengan meletakkan perhatian pada krisis pengendalian tembakau karena tingginya prevalensi perokok anak muda serta maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok yang menargetkan generasi muda di Indonesia. Jurnalis meletakkan fakta tentang kondisi yang mengkhawatirkan ini sebagai permasalahan utama sekaligus fokus utama dari pemberitaan, seperti yang terlihat pada artikel berita berjudul “Temuan di 9 Daerah: Iklan Rokok Marak di Lokasi yang Dekat dengan Anak” dan “70 Juta Orang di Indonesia Merokok, Mayoritas Anak Muda”. Selain penggunaan judul atau

headline berita, Kompas.com juga menjabarkan masalah utama di paragraf awal atau lead berita sebagai berikut,

“Iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok marak ditemukan di lokasi yang dekat dengan aktivitas anak-anak. Temuan itu berdasarkan laporan dari Forum Anak dan Yayasan Lentera Anak dari pemantauan di sembilan kabupaten/kota di Indonesia baru-baru ini.”

Selain pemilihan fakta atau informasi, pembingkai berita juga dilakukan melalui praktik jurnalistik yang terstruktur dengan cara menyusun dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk membentuk interpretasi khalayak pembaca (Bruggemann. 2014:68). Oleh karena itu, elemen yang paling menonjol seperti headline dan lead memiliki posisi strategis untuk menonjolkan isu serta sudut pandang tertentu di dalam bingkai berita. Dengan menempatkan frase dan kalimat di posisi yang paling menarik perhatian yaitu pada headline dan lead, Kompas.com berusaha memberikan gambaran adanya krisis atau kondisi yang mengancam upaya pengendalian tembakau khususnya dalam misi melindungi generasi muda dari paparan promosi dan produk rokok. Hal ini sekaligus menjadikannya bingkai yang paling dominan di dalam pemberitaan. Untuk menjelaskan krisis yang nyata terjadi di masyarakat ini, Kompas.com menggunakan narasi berbasis pada data antara lain laporan hasil pemantauan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok dari Forum Anak dan Yayasan Lentera Anak, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari Kemenkes, maupun, data Global Adult Tobacco Survey (GATS) yang dirilis oleh WHO. Melalui strategi penjabaran data ini, jurnalis berupaya menampilkan realitas di lapangan yang

terdokumentasikan secara empiris. Penggunaan data-data tersebut juga memperkuat fakta bahwa krisis yang terjadi saat ini mendapat sorotan dari berbagai pihak mulai dari LSM hingga organisasi kesehatan dunia (WHO).

Pembingkaian berita yang dilakukan oleh Kompas.com cenderung menempatkan industri tembakau sebagai aktor penyebab masalah. Jurnalis tidak secara tegas menyebutkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor rokok menyebabkan tingginya prevalensi perokok anak muda, melainkan menggunakan frasa seperti “tingginya jumlah perokok di Indonesia tak bisa dilepaskan dari industri rokok yang gencar memasarkan produknya di masyarakat”. Frasa yang digunakan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua fenomena, yaitu tingginya prevalensi perokok anak muda dan gencarnya iklan, promosi, dan sponsor rokok, namun bukan sebagai faktor utama atau satu-satunya. Justru makna yang lebih kuat dalam narasi tersebut adalah bahwa industri tembakau secara gencar menggunakan strategi iklan, promosi, dan sponsor dengan menargetkan anak-anak muda sebagai target pasar yang potensial.

Adapun di dalam narasi pemberitaan ini, jurnalis tidak menarasikan secara eksplisit solusi apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Meski begitu, menurut Entman, elemen yang tidak ditampilkan atau bersifat implisit sama pentingnya dengan elemen yang ditonjolkan dalam membentuk bingkai berita (Entman, 1993:54). Ketiadaan elemen solusi dalam pemberitaan Kompas.com diartikan sebagai pembebasan khalayak untuk menginterpretasikan penyelesaian masalah. Hal ini sekaligus dapat dimaknai sebagai strategi

Kompas.com dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan pengendalian tembakau di Indonesia.

Berbeda dengan Kompas.com yang menyoroti krisis pengendalian tembakau, pemingkaian berita yang dilakukan oleh Antaranews.com lebih menekankan pada peringatan ancaman sistemik bagi upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Dengan kata lain, jurnalis tidak sekadar menjabarkan tren peningkatan prevalensi perokok aktif di kalangan anak-anak muda semata, melainkan juga potensi dampak negatif yang ditimbulkan di masa depan, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Bingkai ini dapat dilihat dari pemberitaan Antaranews.com yang berjudul “Iklan dan Promosi Rokok Marak, Jumlah Perokok Anak Meningkat” dan “WHO Sebut Peningkatan Konsumsi Rokok di RI Mengancam Generasi Muda”. Informasi dikemas dengan mengutamakan pernyataan dari para narasumber dan didukung oleh data statistik yang mereka paparkan.

Pemberitaan Antaranews.com secara tegas menyebut maraknya paparan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagai penyebab terjadinya peningkatan prevalensi perokok anak. Dalam hal ini Antaranews.com berupaya menekankan kausalitas atau hubungan sebab akibat di antara kedua fenomena tersebut seperti yang dinarasikan oleh jurnalis Antaranews.com pada lead berita sebagai berikut,

“Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok merupakan penyebab jumlah anak merokok meningkat.”

Baik industri tembakau maupun pemerintah sama-sama ditempatkan sebagai aktor penyebab masalah. Industri tembakau menjadi aktor yang berperan dalam mendorong kebiasaan merokok di kalangan anak-anak dan remaja melalui iklan, promosi, dan sponsor rokok yang dilakukan secara gencar, termasuk pula mempromosikan penggunaan rokok elektrik. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai terlalu lemah dalam kebijakan pengendalian tembakau karena tidak dapat mencegah intervensi industri tembakau. Alasan lainnya adalah Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum terlibat dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang telah diinisiasi oleh WHO sejak lama. Seiring dengan ancaman bahaya peningkatan prevalensi perokok bagi generasi muda ini, pemerintah dinilai harus segera mengatasi persoalan. Pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis *Antaranews.com* juga cenderung memberikan solusi yang eksplisit untuk menyelesaikan masalah, termasuk mendorong keterlibatan pemerintah dalam agenda pengendalian tembakau dunia, yaitu WHO FCTC Global. Narasi yang dibangun dalam pemberitaan *Kompas.com* sekaligus menyisipkan penilaian moral bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab melindungi masyarakat, terutama generasi muda.

Meski kedua media online cenderung menunjukkan perbedaan dalam membingkai persoalan tingginya prevalensi perokok anak muda di Indonesia ini, keduanya tetap berbagi kesamaan sudut pandang yang menilai bahwa generasi muda merupakan korban, di mana paparan iklan dan promosi rokok telah mendorong mereka untuk mengonsumsi rokok. Hal ini sekaligus menunjukkan

bahwa isu kesehatan dan perlindungan anak tetap menjadi pendekatan yang digunakan oleh kedua media online untuk membingkai persoalan tingginya prevalensi perokok aktif di kalangan anak muda serta maraknya iklan, promosi, dan sponsor yang menargetkan anak-anak muda.

4.2.4 Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan pengendalian tembakau yang bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok sekaligus menurunkan tingkat konsumsi produk olahan tembakau. Berbeda dengan kebijakan yang berorientasi pada pengendalian fiskal maupun nonfiskal yang ditujukan untuk pengurangan permintaan produk olahan tembakau, penerapan KTR menempatkan regulasi ruang publik sebagai instrumen utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dan bebas paparan asap rokok. Identifikasi elemen-elemen framing pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa baik Kompas.com maupun Antaranews.com sama-sama memandang implementasi KTR sebagai strategi penting dalam pengendalian konsumsi rokok. Akan tetapi, kedua media online tetap mengonstruksi kebijakan tersebut menggunakan sudut pandang dan perspektifnya masing-masing. Kompas.com membangun bingkai dominan implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kewajiban negara yang belum tuntas, sedangkan Antaranews.com membangun bingkai implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah yang perlu diapresiasi. Adanya perbedaan dalam narasi berita yang ditampilkan oleh kedua media online tidak

hanya sekadar keragaman informasi, melainkan bukti yang menunjukkan setiap media massa berupaya mengarahkan cara khalayak memahami keberhasilan maupun tantangan implementasi kebijakan KTR di daerah melalui proses seleksi dan penonjolan fakta sebagaimana dijelaskan oleh Entman (1993:52).

Kedua media tetap memiliki kesamaan dalam menempatkan kebijakan KTR sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Kedua media sama-sama menggunakan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebagai narasumber utama, sehingga perspektif pemerintah mendominasi pemberitaan. Selain itu, kedua media juga membangun hubungan sebab-akibat yang serupa, yaitu tingginya konsumsi rokok dipandang sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan berskala nasional melalui implementasi kebijakan KTR. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa baik Kompas.com maupun Antaranews.com memiliki titik temu dalam memaknai fungsi kebijakan KTR sebagai instrumen pengendalian tembakau. Kedua media menggunakan kerangka interpretasi (frame) yang sama untuk mengorganisasi pengalaman sosial mengenai pentingnya ruang publik bebas asap rokok sehingga masyarakat diarahkan untuk memandang KTR sebagai kebutuhan dalam perlindungan kesehatan publik (Goffman, 1974:21).

Namun, kedua media online tetap melakukan seleksi fakta dan penonjolan isu yang tidak sepenuhnya sama. Kompas.com mengonstruksi realitas melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada akuntabilitas kebijakan. Pemberitaan berjudul “Kemenkes Targetkan Seluruh Wilayah Punya Kawasan Tanpa Rokok Tahun Ini” tidak berhenti pada informasi mengenai keberadaan kebijakan KTR,

tetapi menempatkan target pemerintah sebagai fokus utama pemberitaan. Penekanan terhadap fakta bahwa hingga pertengahan tahun 2023 implementasi KTR baru mencapai 86 persen dari daerah menjadi indikator bahwa pemerintah masih menghadapi pekerjaan yang belum selesai. Dengan demikian, persoalan utama yang dibangun bukan semata-mata keberadaan KTR, melainkan kesenjangan antara target nasional dan realisasi di lapangan.

Pemilihan fakta yang dilakukan oleh Kompas.com berimplikasi pada konstruksi aktor penyebab masalah. Kompas.com secara implisit menempatkan pemerintah daerah yang belum menerapkan KTR sebagai penyebab belum optimalnya pengendalian konsumsi rokok. Penekanan terhadap belum meratanya implementasi KTR membentuk pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat lokal. Dengan kata lain, media tidak membingkai persoalan sebagai kegagalan pemerintah pusat, tetapi sebagai belum optimalnya pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa Kompas.com membangun hubungan sebab-akibat yang berorientasi pada capaian kinerja pemerintahan.

Pilihan narasi tersebut juga diperkuat oleh kutipan Wamenkes yang menekankan target pencapaian 100 persen implementasi KTR serta perlunya dukungan kepala daerah. Padahal, narasumber yang digunakan sama dengan Antaranews.com. Akan tetapi, Kompas.com memilih bagian pernyataan yang berkaitan dengan target, percepatan implementasi, dan tantangan yang masih dihadapi pemerintah. Temuan ini memperlihatkan bahwa framing tidak hanya

ditentukan oleh siapa yang menjadi narasumber, tetapi juga oleh bagian mana dari pernyataan narasumber yang dipilih untuk ditonjolkan. Menurut Entman, proses framing memang berlangsung melalui pemilihan aspek tertentu dari realitas sehingga aspek tersebut memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan dengan informasi lainnya (Entman, 1993:52).

Selain itu, penilaian moral yang dibangun Kompas.com juga menunjukkan kecenderungan yang lebih kritis. Frasa seperti “baru mencapai 86 persen” dan “ditargetkan menjadi 100 persen” mengandung makna bahwa implementasi KTR belum sepenuhnya memenuhi harapan pemerintah. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa keberlanjutan kebijakan, tetapi juga percepatan implementasi KTR, penyusunan regulasi mengenai rokok elektrik, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, realitas mengenai implementasi KTR yang belum optimal tersebut bukan sekadar cerminan kondisi objektif, melainkan hasil konstruksi media melalui pemilihan fakta yang menonjolkan adanya kesenjangan antara target dan capaian kebijakan (Berger & Luckmann, 1966:66–67).

Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com mengonstruksi implementasi KTR melalui perspektif yang lebih berorientasi pada pengakuan terhadap komitmen pemerintah daerah. Pemberitaan berjudul “Kemenkes Apresiasi Komitmen Daerah Kendalikan Konsumsi Rokok” tidak menempatkan ketidaktercapaian target sebagai persoalan utama. Sebaliknya, media ini memilih menjadikan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah, organisasi, dan tokoh yang berhasil menerapkan KTR sebagai pusat pemberitaan. Penonjolan

tersebut menunjukkan bahwa Antaranews.com lebih menekankan sisi keberhasilan implementasi dibandingkan dengan tantangan yang masih dihadapi.

Pilihan fakta tersebut menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda. Jika Kompas.com membangun narasi mengenai kewajiban negara yang belum selesai, Antaranews.com membangun narasi mengenai pentingnya mempertahankan komitmen berbagai pihak dalam mengimplementasikan KTR. Pemberian penghargaan diposisikan bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap aktor-aktor yang telah mendukung pengendalian tembakau. Dengan demikian, keberhasilan implementasi KTR dipahami sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi, dan masyarakat.

Orientasi framing Antaranews.com juga terlihat dari pemilihan kutipan Wamenkes yang berbeda. Meskipun menggunakan narasumber yang sama dengan Kompas.com, media ini lebih banyak mengutip pernyataan mengenai pentingnya penghargaan sebagai motivasi untuk memperkuat komitmen daerah dalam melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Penonjolan terhadap fungsi motivasional penghargaan memperlihatkan bahwa media berusaha membangun citra positif terhadap implementasi KTR. Dalam perspektif Goffman, pengalaman sosial mengenai kebijakan KTR diorganisasikan melalui kerangka penghargaan dan keberhasilan sehingga khalayak lebih mudah memandang implementasi KTR sebagai bentuk kolaborasi yang patut diapresiasi daripada sebagai persoalan yang belum terselesaikan (Goffman, 1974:21).

Pilihan tersebut juga memengaruhi penilaian moral yang dibangun Antaranews.com. Berbeda dengan Kompas.com yang menyoroti kekurangan implementasi, Antaranews.com menilai bahwa pemberian penghargaan merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat motivasi pemerintah daerah dalam mengendalikan konsumsi rokok. Penilaian moral tersebut didukung oleh rekomendasi berupa optimalisasi implementasi KTR melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan Dashboard E-Money, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan lebih menekankan penguatan komitmen daripada percepatan pencapaian target.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, kedua media memperlihatkan perbedaan orientasi dalam mengonstruksi implementasi KTR meskipun menggunakan narasumber yang sama. Kompas.com membangun framing melalui paradigma akuntabilitas kebijakan, yaitu menilai implementasi KTR berdasarkan kesesuaian antara target nasional dan realisasi di lapangan. Sebaliknya, Antaranews.com membangun framing melalui paradigma apresiasi terhadap implementasi, yaitu menempatkan penghargaan sebagai instrumen untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses framing tidak hanya bergantung pada fakta yang tersedia, tetapi juga pada keputusan redaksional mengenai fakta mana yang dianggap paling penting untuk memperoleh perhatian publik.

Temuan ini sekaligus menguatkan pandangan Berger dan Luckmann bahwa realitas media merupakan hasil konstruksi sosial, bukan representasi langsung dari

kenyataan (Berger & Luckmann, 1966:78). Kedua media melaporkan peristiwa yang sama, menggunakan narasumber yang sama, bahkan berlangsung pada waktu yang sama. Namun, melalui proses seleksi fakta, pemilihan kutipan, dan penonjolan aspek tertentu, keduanya menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda. Kompas.com mengarahkan khalayak untuk memahami implementasi KTR sebagai kewajiban pemerintah yang masih perlu disempurnakan, sedangkan Antaranews.com mengarahkan khalayak untuk memandang implementasi KTR sebagai keberhasilan kolaboratif yang layak memperoleh apresiasi.

4.2.5 Pemanfaatan Produk Tembakau Alternatif

Penggunaan produk tembakau alternatif merupakan salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam polemik kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Perdebatan tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai posisi produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, dalam upaya menurunkan dampak kesehatan akibat konsumsi rokok konvensional. Di satu sisi, WHO tidak menempatkan produk tembakau alternatif sebagai bagian dari strategi utama pengendalian tembakau dalam kerangka FCTC. Di sisi lain, berkembang pendekatan pengurangan bahaya tembakau (tobacco harm reduction) yang memandang produk tersebut memiliki potensi untuk mengurangi risiko kesehatan bagi perokok dewasa yang belum berhasil berhenti merokok sepenuhnya. Perbedaan perspektif tersebut menjadikan produk tembakau alternatif sebagai arena perdebatan yang melibatkan pemerintah, organisasi kesehatan, asosiasi konsumen, akademisi, hingga industri tembakau. Secara umum bahwa baik Kompas.com maupun Antaranews.com sama-sama memberikan ruang terhadap narasi yang mendukung pemanfaatan produk tembakau

alternatif. Akan tetapi, kedua media mengonstruksi dukungan tersebut melalui sudut pandang dan fokus pemberitaan yang berbeda. Kompas.com membangun bingkai dominan tentang penggunaan produk tembakau alternatif sebagai hak perokok dewasa yang harus dilindungi, sedangkan Antaranews.com lebih menekankan pada bingkai "produk tembakau alternatif sebagai solusi pengurangan bahaya tembakau. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua media melakukan proses seleksi fakta dan penonjolan aspek tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Entman, sehingga menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda terhadap isu yang sama.

Baik Kompas.com maupun Antaranews.com tidak menjadikan keberadaan produk tembakau alternatif sebagai persoalan yang perlu dibatasi atau ditolak. Sebaliknya, kedua media online tersebut lebih banyak menonjolkan manfaat khususnya bagi perokok dewasa yang didukung oleh berbagai hasil penelitian, pengalaman internasional, maupun pendapat narasumber yang mendukung pendekatan harm reduction. Persamaan lainnya tampak pada proses seleksi narasumber. Kedua media online sama-sama menghadirkan narasumber yang berasal dari organisasi maupun pakar yang memiliki pandangan positif terhadap produk tembakau alternatif. Dalam perspektif framing, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi realitas tidak hanya dilakukan terhadap fakta, tetapi juga terhadap sumber informasi yang diberikan legitimasi untuk mendefinisikan suatu persoalan publik. Dengan demikian, kedua media online sebenarnya memiliki kecenderungan yang sama dalam membangun narasi besar mengenai pemanfaatan produk tembakau alternatif, meskipun menggunakan pendekatan argumentasi yang berbeda.

Meskipun demikian, Kompas.com membangun konstruksi realitas melalui perspektif yang berbeda dengan Antaranews.com. Pemberitaan berjudul "Asosiasi Ungkap Pentingnya Akses Informasi Akurat tentang Produk Tembakau Alternatif" tidak secara langsung menempatkan manfaat kesehatan sebagai fokus utama. Sebaliknya, media ini

justeru menyoroti aspek pemenuhan hak masyarakat, khususnya perokok dewasa, untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai produk tembakau alternatif. Bingkai tersebut tampak sejak pemilihan judul berita yang menonjolkan frasa "pentingnya akses informasi akurat" sebagai isu utama. Dengan demikian, perhatian pembaca diarahkan bukan pada perdebatan mengenai keamanan produk, melainkan pada persoalan keterbukaan informasi yang diperlukan agar konsumen mampu mengambil keputusan secara rasional.

Konstruksi tersebut semakin diperkuat melalui pemilihan narasumber yang berasal dari Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) dan Asosiasi Vaper Indonesia (AVI). Pemilihan kedua organisasi tersebut menjadi bagian dari strategi pembingkai yang dilakukan untuk membangun perspektif tertentu terhadap isu produk tembakau alternatif. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang perlindungan hak konsumen, AKVINDO dan AVI memiliki kepentingan untuk mendorong tersedianya informasi yang objektif mengenai manfaat maupun risiko penggunaan produk tembakau alternatif. Dengan begitu, persoalan yang paling ditekankan adalah hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap sebelum menentukan pilihan. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, realitas mengenai produk tembakau alternatif tidak diperlakukan sebagai kenyataan yang objektif, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui pemilihan perspektif tertentu. Dengan memberikan ruang kepada asosiasi konsumen, Kompas.com mengonstruksi penggunaan produk tembakau alternatif sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen sekaligus kebebasan individu dalam menentukan pilihan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat.

Penggunaan hasil penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko lebih rendah dibandingkan rokok konvensional semakin memperkuat penonjolan isu tentang besarnya manfaat produk tembakau alternatif karena didukung oleh data ilmiah. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfungsi sebagai dasar

legitimasi terhadap pentingnya penyediaan informasi yang akurat daripada sebagai argumen utama mengenai manfaat kesehatan. Solusi yang ditawarkan juga tidak diarahkan pada penggunaan produk tembakau alternatif itu sendiri, melainkan pada perlunya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi konsumen, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyediakan informasi yang berbasis bukti ilmiah. Dengan demikian, Kompas.com membangun hubungan sebab-akibat daripada secara langsung mengarahkan pada penggunaan produk tembakau alternatif. Pembingkai yang dilakukan oleh Kompas.com ini juga memberikan penekanan pada keterbatasan akses informasi yang menyebabkan masyarakat belum mampu membuat keputusan secara tepat. Oleh karena itu, bingkai dominan yang dibangun oleh media ini dapat dipahami bahwa penggunaan produk tembakau alternatif merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi melalui penyediaan informasi yang akurat.

Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com mengonstruksi penggunaan produk tembakau alternatif melalui perspektif kesehatan masyarakat. Pemberitaan berjudul "Pakar: Produk Tembakau Alternatif Solusi Pengurangan Bahaya Tembakau" sejak awal telah mengarahkan perhatian pembaca pada fungsi produk tembakau alternatif sebagai bagian dari strategi harm reduction. Frasa "solusi pengurangan bahaya tembakau" menunjukkan bahwa fokus pemberitaan ini terletak pada upaya mengingatkan pemerintah tentang adanya strategi untuk mengurangi dampak negatif rokok konvensional terhadap kesehatan. Dengan demikian, konstruksi realitas yang dibangun Antaranews.com berangkat dari persoalan tingginya prevalensi perokok, sedangkan produk tembakau alternatif diposisikan sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya.

Pemilihan narasumber juga menunjukkan perbedaan orientasi framing. Antaranews.com menghadirkan Maria Alejandra Medina sebagai Koordinator Corporación Acción Técnica Social Kolombia dan Anders Milton sebagai mantan Ketua Asosiasi Medis

Dunia. Kedua narasumber tersebut memiliki latar belakang sebagai praktisi dan pakar kesehatan internasional yang selama ini dikenal mendukung pendekatan harm reduction. Kehadiran mereka memberikan legitimasi ilmiah terhadap manfaat penggunaan produk tembakau alternatif. Berbeda dengan Kompas.com yang memperoleh legitimasi melalui organisasi konsumen, Antaranews.com memperoleh legitimasi melalui otoritas akademik dan profesi kesehatan. Dalam perspektif Goffman, media massa sedang membangun kerangka interpretasi yang berbeda bagi khalayak. Produk tembakau alternatif dipahami sebagai instrumen kesehatan masyarakat yang memiliki potensi untuk mengurangi risiko penyakit akibat konsumsi rokok konvensional.

Perbedaan orientasi tersebut berpengaruh terhadap cara Antaranews.com mengonstruksi solusi. Media online ini tidak menempatkan penyediaan informasi sebagai inti penyelesaian masalah seperti yang ditekankan oleh Kompas.com, melainkan lebih menekankan pemanfaatan produk tembakau alternatif sebagai strategi awal untuk mengurangi risiko kesehatan, terutama pada perokok dewasa yang belum dapat berhenti merokok sepenuhnya. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat yang dibangun Antaranews.com lebih sederhana, yaitu tingginya prevalensi merokok memerlukan alternatif yang memiliki risiko lebih rendah. Oleh karena itu, bingkai dominan yang muncul adalah produk tembakau alternatif sebagai solusi untuk pengurangan bahaya tembakau.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, perbedaan kedua media online bukan pada persepsi positif atau negatif terhadap produk tembakau alternatif, melainkan pada perspektif tentang potensi pemanfaatan produk tembakau alternatif. Kompas.com menggunakan pendekatan perlindungan hak konsumen dengan menekankan pentingnya akses terhadap informasi yang akurat, sedangkan Antaranews.com menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat dengan menonjolkan manfaat produk tembakau alternatif sebagai strategi harm reduction. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa

proses framing tidak hanya ditentukan oleh fakta yang dipilih, tetapi juga oleh identitas narasumber, konteks yang dibangun, dan sudut pandang yang digunakan untuk menginterpretasikan fakta.

Temuan lain yang menarik adalah bahwa kedua media sama-sama tidak memberikan ruang kepada perspektif yang berseberangan dengan narasi harm reduction. Ketidadaan organisasi kesehatan masyarakat yang kritis terhadap produk tembakau alternatif menyebabkan pemberitaan lebih banyak didominasi oleh narasi yang mendukung pemanfaatan produk tersebut. Dalam perspektif Entman, aspek ini menunjukkan bahwa framing tidak hanya dibentuk melalui penonjolan informasi tertentu (salience), tetapi juga melalui penghilangan atau pengabaian perspektif lain (selection). Akibatnya, khalayak lebih banyak menerima informasi mengenai manfaat produk tembakau alternatif dibandingkan dengan kontroversi ilmiah yang masih berkembang mengenai efektivitas jangka panjang maupun potensi risiko kesehatannya.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan framing Kompas.com dan Antaranews.com tidak selalu mencerminkan perbedaan posisi editorial terhadap isu yang diberitakan. Kedua media sama-sama membangun representasi yang cenderung positif terhadap penggunaan produk tembakau alternatif, tetapi melalui jalur argumentasi yang berbeda. Kompas.com mengonstruksi realitas melalui paradigma hak konsumen, sedangkan Antaranews.com mengonstruksinya melalui paradigma pengurangan bahaya tembakau. Temuan ini menguatkan pandangan konstruktivistik Berger dan Luckmann bahwa realitas media bukan merupakan refleksi langsung dari kenyataan sosial, melainkan hasil proses konstruksi yang dibentuk melalui seleksi fakta, pemilihan narasumber, serta penataan hubungan antarfakta. Oleh karena itu, pada isu produk tembakau alternatif, perbedaan framing lebih merepresentasikan perbedaan strategi membangun legitimasi daripada perbedaan orientasi ideologis kedua media.

4.2.6 Dampak Rokok bagi Lingkungan

Berbeda dengan isu-isu pengendalian tembakau yang umumnya diposisikan sebagai persoalan kesehatan individu dan masyarakat, pada kategori ini kedua media sama-sama memperluas pembahasan menuju dampak konsumsi rokok terhadap lingkungan. Hasil sintesis framing pada bab sebelumnya telah menunjukkan bahwa Kompas.com membangun bingkai dominan terkait sampah puntung rokok sebagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan, sedangkan Antaranews.com membangun bingkai kerusakan lingkungan akibat sampah puntung rokok sebagai bagian dari perluasan agenda pengendalian tembakau global. Meskipun kedua media sama-sama mengangkat persoalan lingkungan sebagai isu utama, namun keduanya menyeleksi fakta, menonjolkan aspek tertentu, serta mengarahkan penafsiran khalayak melalui sudut pandang pembingkai yang tidak sepenuhnya benar-benar sama. Perbedaan pembingkai kedua media online sejalan dengan pandangan Entman (1993) bahwa framing berlangsung melalui proses seleksi realitas dan penonjolan aspek tertentu sehingga khalayak diarahkan untuk memahami suatu peristiwa melalui sudut pandang yang dipilih media.

Persamaan pembingkai kedua media online terlihat pada cara keduanya mendefinisikan puntung rokok sebagai sumber pencemaran lingkungan yang memerlukan perhatian publik. Baik Kompas.com maupun Antaranews.com sama-sama menggunakan data yang menunjukkan adanya miliaran puntung rokok yang dibuang setiap tahun, mengutip pandangan organisasi masyarakat sipil, serta mengaitkan persoalan tersebut dengan perhatian WHO terhadap dampak lingkungan akibat konsumsi rokok. Kesamaan informasi tersebut menunjukkan

bahwa kedua media online membangun kesadaran bahwa pengendalian tembakau tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan yang lestari. Dengan kata lain, kedua media melakukan proses seleksi terhadap fakta-fakta yang memperluas makna isu tembakau sehingga tidak lagi dipersepsikan secara sempit sebagai persoalan perilaku merokok, melainkan sebagai persoalan ekologis yang memiliki dampak sosial lebih luas.

Meskipun demikian, kedua media online berbeda dalam menentukan aspek mana yang paling layak ditonjolkan. Kompas.com cenderung membangun framing melalui fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Judul "Tak Hanya Kesehatan, Puntung Rokok Juga Merusak Lingkungan" menjadi titik masuk bagi pembaca untuk memahami bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi nyata dari kebiasaan membuang puntung rokok secara sembarangan. Penonjolan terhadap data statistik, kondisi pencemaran, serta perilaku perokok menunjukkan bahwa Kompas.com mengarahkan perhatian khalayak pada dimensi faktual dari persoalan lingkungan. Dalam perspektif Entman, strategi tersebut merupakan bentuk penonjolan terhadap konsekuensi nyata suatu masalah agar aspek tertentu memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan dengan aspek lainnya. Dengan demikian, konstruksi realitas yang dibangun Kompas.com menempatkan pencemaran lingkungan sebagai persoalan yang dapat diamati secara langsung melalui fakta empiris.

Perbedaan lain tampak pada cara Kompas.com mengonstruksi penyebab dan tanggung jawab atas persoalan tersebut. Meskipun perilaku perokok yang

membuang puntung rokok sembarangan memperoleh penekanan lebih besar, media ini tidak sepenuhnya memusatkan kesalahan pada satu aktor. Persoalan lingkungan dipahami sebagai konsekuensi dari hubungan berbagai faktor yang melibatkan perilaku individu, belum optimalnya sistem pengelolaan limbah, tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), serta peran pemerintah dalam membangun tata kelola pengelolaan sampah. Dengan demikian, framing Kompas.com cenderung menghasilkan konstruksi tanggung jawab yang bersifat kolektif. Dalam perspektif Berger dan Luckmann, realitas tersebut tidak dipahami sebagai kenyataan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses pemilihan dan penyusunan fakta oleh media massa.

Sebaliknya, Antaranews.com tidak menjadikan kondisi empiris di lapangan sebagai pusat perhatian utama. Media ini lebih banyak menempatkan isu lingkungan dalam konteks kebijakan pengendalian tembakau di tingkat global. Judul "Lentera Anak Soroti Dampak Negatif Rokok Bagi Lingkungan" mengarahkan perhatian pembaca pada pandangan organisasi masyarakat sipil, yaitu Yayasan Lentera Anak. Mengenai pentingnya memasukkan isu lingkungan ke dalam agenda pengendalian tembakau. Penonjolan terhadap kebijakan WHO sejak tahun 2017 serta kampanye internasional mengenai sampah puntung rokok menunjukkan bahwa Antaranews.com membangun legitimasi persoalan lingkungan melalui rujukan terhadap institusi dan norma global. Dengan kata lain, proses seleksi fakta yang dilakukan Antaranews.com lebih berorientasi pada konteks kebijakan pengendalian tembakau global.

Pilihan tersebut juga memengaruhi cara Antaranews.com mengonstruksi aktor yang dianggap memiliki tanggung jawab utama. Dibandingkan dengan Kompas.com yang membagi tanggung jawab kepada berbagai pihak, Antaranews.com lebih menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam mengimplementasikan agenda pengelolaan sampah puntung rokok serta mendukung kampanye lingkungan yang telah berkembang di tingkat internasional. Dominasi sumber berita dari Yayasan Lentera Anak memperkuat arah framing tersebut karena organisasi tersebut memosisikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjamin kualitas hidup generasi muda di masa mendatang.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, kedua media sama-sama berupaya memperluas pemaknaan isu pengendalian tembakau hingga mencakup persoalan lingkungan. Akan tetapi, proses seleksi dan penonjolan fakta menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda. Kompas.com lebih menonjolkan bingkai "rokok sebagai penyebab pencemaran lingkungan" melalui penekanan terhadap fakta empiris, perilaku sosial, dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan. Sebaliknya, Antaranews.com lebih menonjolkan bingkai "dampak lingkungan sebagai bagian dari agenda global pengendalian tembakau" melalui penekanan pada legitimasi kebijakan internasional dan peran pemerintah dalam mengimplementasikan komitmen tersebut. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa framing media tidak hanya ditentukan oleh fakta yang diberitakan, tetapi juga oleh keputusan redaksional mengenai fakta mana yang dipilih, aspek mana yang ditonjolkan, serta bagaimana fakta-fakta tersebut dirangkai menjadi suatu konstruksi realitas yang bermakna bagi khalayak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis perbandingan framing berita terkait polemik kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti merangkum beberapa poin kesimpulan. Pertama, hasil identifikasi dari 22 artikel berita di Kompas.com dan Antaranews.com menunjukkan bahwa kedua media online tidak menampilkan realitas tentang persoalan kebijakan pengendalian tembakau secara utuh dan netral, melainkan membungkainya ke dalam berbagai kerangka isu mulai dari isu kesehatan, ekonomi, hukum, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, hak konsumen, hingga isu lingkungan. Kedua media online memiliki kecenderungan menonjolkan kerangka isu tertentu untuk membentuk bingkai yang dominan. Kompas.com membingkai persoalan kebijakan pengendalian tembakau dengan lebih menonjolkan isu ekonomi, kesejahteraan sosial, dan hak konsumen. Sedangkan Antaranews.com lebih menonjolkan isu kesehatan masyarakat dan hukum di dalam bingkai beritanya. Namun, kedua media online juga memiliki titik temu terutama pada kerangka isu perlindungan anak dan isu lingkungan.

Kedua, hasil analisis perbandingan framing pada enam kategori tema menunjukkan keberagaman bingkai berita dari kedua media online. Pada kategori regulasi, Kompas.com cenderung membingkai rencana revisi PP 109 Tahun 2012 dan usulan pasal pengamanan zat adiktif di RUU Kesehatan sebagai ancaman bagi